

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

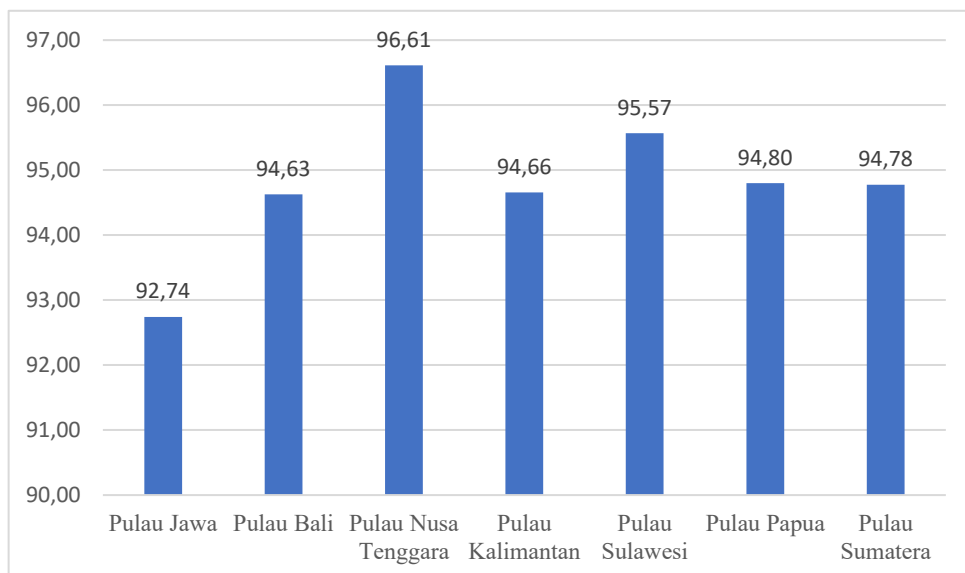
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk cukup besar, hal ini yang mendukung salah satu faktor pembangunan terpenting Indonesia ialah tenaga kerja (Ardella dkk, 2019). Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 278 juta jiwa yang tersebar di 17.000 lebih pulau, ditambah sebagian besar penduduk tersebut merupakan usia produktif yaitu usia 15-64 tahun. Hal ini dapat dipastikan bahwa Indonesia pada 10 tahun bahkan 20 tahun mendatang akan mendapat bonus demografi. Jika kondisi ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal akan mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih maju dengan pendapatan yang tinggi (Kurniawan & Aisyah, 2023). Sudah seharusnya dengan adanya kondisi ini lapangan kerja di Indonesia harus ditingkatkan agar terciptanya angka kesempatan kerja yang meningkat, sehingga bonus demografi ini bisa dimaksimalkan dengan tepat.

Kesempatan kerja menunjukkan kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya selain menciptakan lapangan kerja, mereka merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi negara tersebut. Kesempatan kerja merujuk pada ketersediaan lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja secara optimal, memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang untuk bekerja dan berkontribusi dalam perekonomian (Tanjung, Sambodo, & Rosiana, 2024). Hal ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa tanggung jawab menciptakan dan memperluas kesempatan kerja adalah tugas bersama seluruh elemen bangsa. Dalam konteks ini, bukan hanya pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan kerja, tetapi juga masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang harus turut berperan aktif dalam menciptakan kesempatan kerja (Matdoan, Wahyuningsih, & Laitupa, 2020). Sinergi antara berbagai pihak ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja yang luas, berkualitas, dan berkesinambungan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pemusatan pembangunan di Indonesia berfokus di Pulau Jawa dan Bali, memiliki dampak yang signifikan terhadap pola ekonomi nasional yang dapat dikatakan bahwa Pulau Jawa menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, pendidikan, dan pemerintahan (Nurhardiansyah, Istiyani, & Wahyu, 2017). Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan migrasi dari desa ke kota khususnya Pulau Jawa dan sekitarnya untuk mencari pekerjaan. Dengan adanya perpindahan ini membuat penduduk di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya menjadi bertambah. Jadi walaupun penduduk Indonesia banyak, namun kebanyakan penduduk Indonesia itu bertempat tinggal di Pulau Jawa dan Bali. Sehingga hal ini menyebabkan masalah ketimpangan yaitu lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu menampung tenaga kerja yang ditawarkan (Saputra, Rajuni, & Sukiman, 2021).

Pulau Jawa dan Bali memiliki kepadatan penduduk yang besar mencapai 57% dari populasi di Indonesia pada tahun 2023. Hal ini dapat menjadi potensi tenaga kerja yang besar bagi perekonomian Indonesia. Namun disisi lainnya hal ini dapat menjadikan Pulau Jawa dan Bali memiliki masalah dalam kesempatan yaitu kesempatan kerja tidak dapat menampung jumlah tenaga kerja yang ada. Selain itu pusat pertumbuhan perekonomian terutama pariwisata berpusat di Pulau Jawa dan Bali.



Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Usia 15 Tahun yang Telah Bekerja pada Pulau-Pulau Besar di Indonesia pada Tahun 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.1 memperlihatkan data persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di beberapa pulau-pulau di Indonesia pada tahun 2021, Pulau Nusa Tenggara memiliki persentase tertinggi sebesar 96,61%, disusul oleh Pulau Sulawesi dengan 95,57%. Selanjutnya, Pulau Papua mencatat 94,80%, diikuti oleh Pulau Kalimantan sebesar 94,66% dan Pulau Bali sebesar 94,63%. Sementara itu, Pulau Jawa memiliki persentase terendah sebesar 92,74%. Dari data ini, dapat

disimpulkan bahwa Pulau Nusa Tenggara memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja tertinggi, sedangkan Pulau Jawa memiliki tingkat yang paling rendah di antara pulau-pulau yang dibandingkan.

Kemudian, terlihat bahwa Pulau Jawa memiliki persentase kesempatan kerja terendah dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, yaitu sebesar 92,74%. Pulau Bali menempati posisi kedua terendah dengan persentase sebesar 94,63%. Ini menunjukkan bahwa dari tujuh pulau-pulau besar di Indonesia Pulau Jawa dan Bali menempati posisi ketujuh dan keenam, yang seharusnya pulau padat penduduk tersebut harus memiliki kesempatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan pulau lainnya karena kepadatan penduduk juga pusat perekonomian di pulau tersebut. Hal ini akan menjadikan kurangnya pengoptimalan penggunaan tenaga kerja dari bonus demografi yang ada di pulau padat penduduk tersebut yang kemudian akan menjadi sebuah hambatan dalam menciptakan Indonesia emas di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada Pulau Jawa dan Pulau Bali dengan tujuan untuk menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kesempatan kerja di kedua pulau tersebut. Fokus penelitian pada Pulau Jawa dan Bali diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan ketenagakerjaan serta menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesempatan kerja di wilayah tersebut.

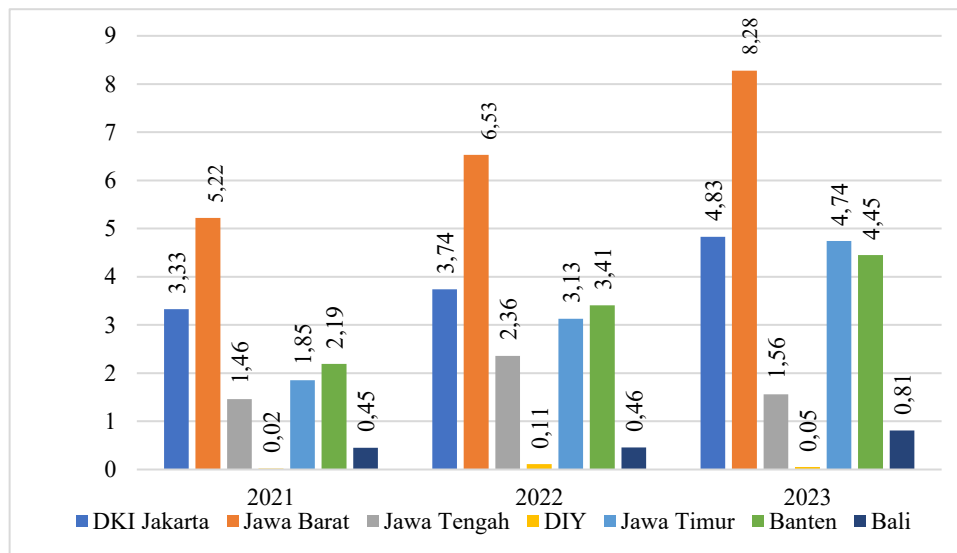
Pulau Jawa dan Bali, meskipun merupakan pusat pembangunan ekonomi dan infrastruktur, memiliki persentase kesempatan kerja yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pulau besar lainnya. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan

berbagai faktor, seperti tingginya tingkat urbanisasi yang meningkatkan kepadatan penduduk di wilayah ini. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan lonjakan jumlah penduduk usia kerja, tetapi pertumbuhan kesempatan kerja tidak seimbang dengan pertumbuhan tersebut. Selain itu volume investasi asing dan domestik, serta jumlah industri yang berkembang turut memengaruhi dinamika pasar kerja di Pulau Jawa dan Bali. Penyesuaian upah minimum juga berkontribusi pada daya tarik dan keberlanjutan kesempatan kerja di kawasan ini. Kombinasi faktor-faktor ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam peningkatan serapan tenaga kerja di Pulau Jawa dan Bali (Mardiansjah, Handayani, & Setyono, 2018).

Investasi atau penanaman modal merupakan aspek penting yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah, karena dampaknya akan berpengaruh terhadap perekonomian suatu wilayah. Dengan meningkatnya investasi, peluang kerja akan bertambah, yang pada gilirannya membantu mengurangi tingkat pengangguran. Selain menciptakan lapangan kerja. Dalam rangka kegiatan peningkatan investasi pemerintah melakukan penerimaan investasi dari perusahaan-perusahaan swasta (Awandari & Indrajaya, 2016).

Di dalam investasi pemerintah terdapat dua jenis investasi atau penanaman modal, yaitu penanaman modal dalam negeri yang mencakup penanaman modal dilakukan oleh perusahaan swasta di dalam negeri, selain itu juga terdapat jenis lainnya yaitu penanaman modal asing atau investasi asing yang merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak luar negeri baik itu dalam skala pemerintahan maupun swasta (Laut, Putri, & Septiani, 2020). PMA bertujuan untuk

memperoleh keuntungan dari negara tujuan investasi sambil berkontribusi pada perekonomian negara tersebut. Investasi ini dapat berbentuk pendirian perusahaan baru, pembelian saham perusahaan lokal, atau kerja sama proyek.

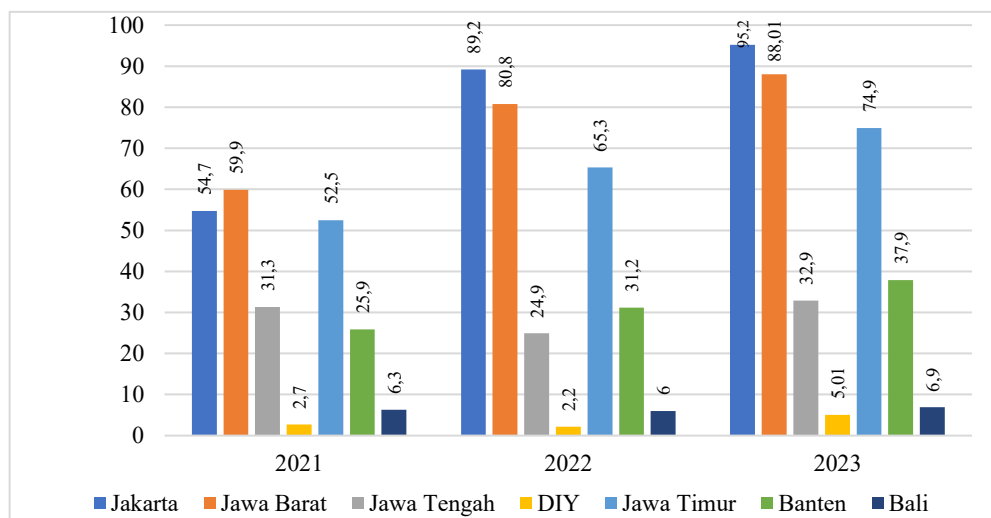


Gambar 1. 2 Investasi Asing menurut Provinsi di Pulau Jawa dan Bali tahun 2021-2023 dalam Miliar USD

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Pada Gambar 1. 2 menunjukkan nilai investasi asing dalam miliar USD di beberapa provinsi di Indonesia selama tiga tahun yaitu 2021-2023, mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Pada tahun 2021, Jawa Barat mendominasi dengan nilai investasi asing sebesar 5,22 miliar USD, diikuti oleh DKI Jakarta 3,33 miliar USD dan Jawa Timur 2,19 miliar USD. Pada tahun 2022, Jawa Barat tetap menjadi provinsi dengan investasi asing tertinggi, mencapai 6,53 miliar USD, sementara DKI Jakarta 3,74 miliar USD dan Jawa Timur 3,41 miliar USD menempati posisi kedua dan ketiga. Pada 2023, Jawa Barat menunjukkan peningkatan signifikan dengan investasi asing sebesar 8,28 miliar USD, diikuti oleh DKI Jakarta 4,83 miliar USD dan Jawa Timur 4,45 miliar USD.

USD. Sementara itu, DIY konsisten memiliki nilai investasi terendah selama periode ini, dengan angka paling kecil pada 2023 sebesar 0,046 miliar USD. Data ini mencerminkan dominasi Jawa Barat sebagai tujuan utama investasi asing dalam tiga tahun terakhir, diikuti oleh DKI Jakarta dan Jawa Timur.



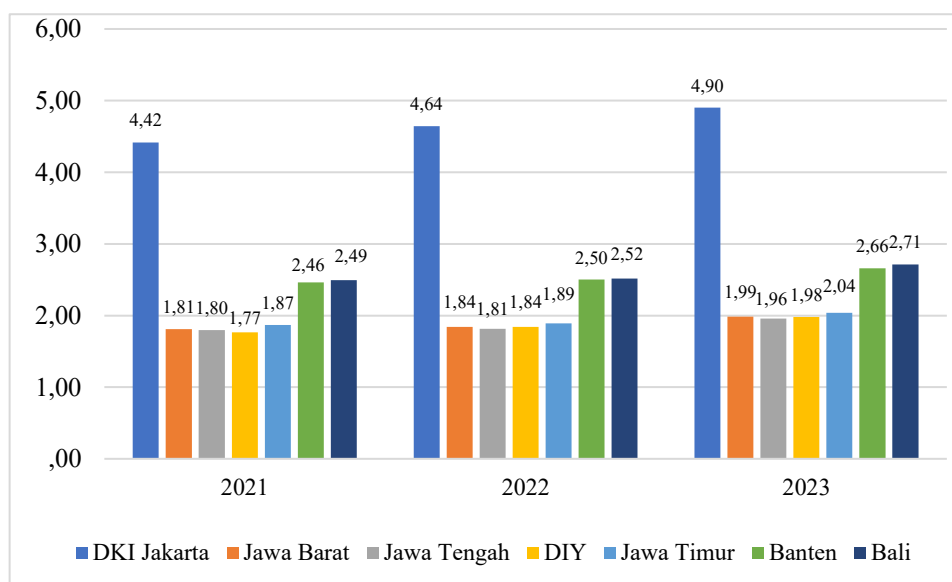
Gambar 1. 3 Investasi domestik menurut Provinsi di Pulau Jawa dan Bali tahun 2021-2023 dalam Triliun Rupiah

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan gambar 1.3, dapat dianalisis bahwa wilayah dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 adalah Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp 59,9 Triliun, sementara wilayah dengan nilai terendah pada tahun yang sama adalah DIY dengan nilai Rp 2,7 Triliun. Pada tahun 2022, posisi wilayah dengan nilai tertinggi diambil alih oleh Jakarta dengan nilai mencapai Rp 89,2 Triliun, sedangkan DIY tetap menjadi wilayah dengan nilai terendah, yaitu Rp 2,2 Triliun. Tren ini berlanjut pada tahun 2023, di mana Jakarta mencatat nilai tertinggi sebesar Rp 95,2 Triliun, sementara DIY masih memiliki nilai terendah, meskipun mengalami peningkatan menjadi Rp 5,0 Triliun.

Secara keseluruhan, DKI Jakarta menunjukkan tren peningkatan nilai yang konsisten dari tahun ke tahun, sehingga menjadikannya wilayah dengan nilai tertinggi sejak tahun 2022. Sebaliknya, Daerah Istimewa Yogyakarta secara konsisten menempati posisi terendah selama periode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan adanya disparitas yang cukup signifikan antarwilayah dalam data yang dianalisis (Rahayu, 2019). Jumlah jam kerja, jumlah produksi, atau jumlah layanan yang di upah merupakan bentuk kompensasi yang adil dan layak yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan tenaga yang telah dicurahkan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dalam konteks hubungan industrial, upah tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup pekerja, tetapi juga sebagai instrumen motivasi yang dapat meningkatkan produktivitas kerja. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja, khususnya bagi mereka yang berada di sektor informal atau di posisi tawar yang lemah, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan upah minimum sebagai bagian dari sistem perlindungan tenaga kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah praktik eksploitasi oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, serta memastikan bahwa setiap pekerja memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Penetapan upah minimum dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak, serta ditetapkan berdasarkan wilayah untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing daerah.

Kebijakan upah ini bertujuan untuk memastikan kelayakan hidup dan produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja mengenai sistem upah minimum di Indonesia untuk saat ini dibagi berbagai jenis berdasarkan tempat atau administrasi wilayah setempat. Terdapat dua jenis upah, yakni upah minimum provinsi yang harus ditetapkan oleh gubernur setiap tahun, serta upah minimum kabupaten/kota yang dapat ditetapkan oleh gubernur dengan syarat tertentu (Izzati, 2023).



Gambar 1. 4 Upah Minimum Provinsi (UMP) menurut provinsi di Pulau Jawa dan Bali tahun 2021-2023 dalam Juta Rupiah

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan data pada gambar 1. 4, terlihat bahwa upah minimum di setiap provinsi di Pulau Jawa dan Bali menunjukkan peningkatan setiap tahunnya selama periode 2021-2023. Provinsi DKI Jakarta mencatatkan upah minimum provinsi tertinggi di wilayah tersebut, yaitu sebesar Rp4,42 juta pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp4,64 juta pada tahun 2022, dan mencapai Rp4,90 juta pada tahun 2023. Sebaliknya, posisi upah minimum terendah pada tahun 2021 ditempati oleh

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1,77 juta. Pada tahun 2022 dan 2023, posisi terendah beralih ke Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai upah minimum sebesar Rp1,81 juta pada tahun 2022 dan Rp1,96 juta pada tahun 2023. Secara keseluruhan, perbedaan upah minimum antar provinsi di wilayah ini relatif tidak terlalu signifikan, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta yang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi.

Industri merupakan suatu kegiatan pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih (Rakhmawati & Boedirochminarni, 2018). Dalam rangka penambahan kesempatan kerja, industri merupakan salah satu faktor pendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi penduduk wilayah tersebut atau sekitarnya.

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Industri Mikro dan Kecil dengan Jumlah Industri Sedang dan Besar di Pulau Jawa dan Bali pada Tahun 2021-2023

Tahun	Pulau Jawa		Pulau Bali	
	Jumlah Industri Mikro Kecil (Unit)	Jumlah Industri Besar Sedang (Unit)	Jumlah Industri Mikro Kecil (Unit)	Jumlah Industri Besar Sedang (Unit)
2021	2.513.555	24.418	148.326	431
2022	2.715.494	25.243	150.466	413
2023	2.793.145	25.901	125.787	456

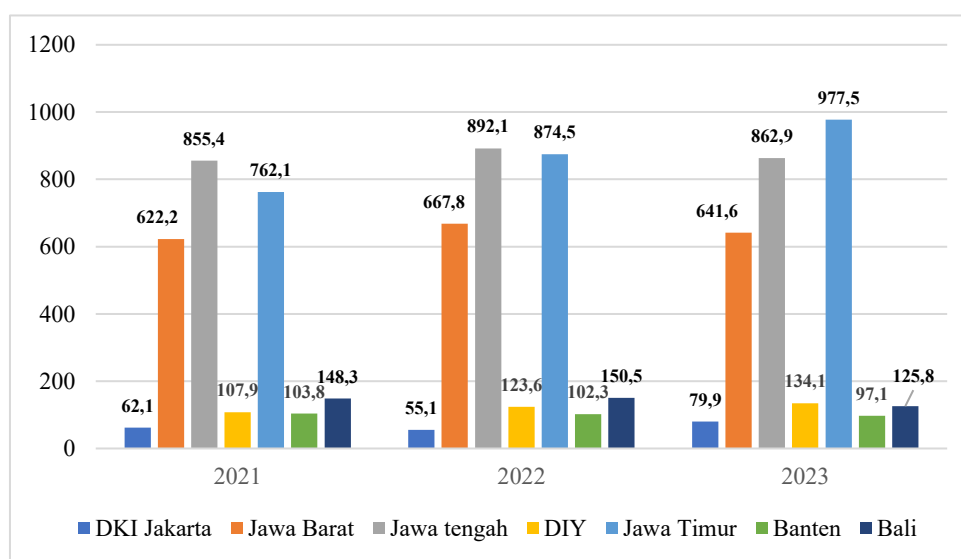
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan data jumlah industri di Pulau Jawa dan Pulau Bali dari tahun 2021 hingga 2023, industri mikro kecil memiliki jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan industri besar sedang. Di Pulau Jawa, jumlah industri mikro kecil

terus meningkat dari 2.513.555 unit pada tahun 2021 menjadi 2.715.494 unit pada 2022, dan mencapai 2.793.145 unit pada 2023. Sementara itu, jumlah industri besar sedang juga mengalami peningkatan, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil, yaitu dari 24.418 unit (2021) menjadi 25.243 unit (2022) dan 25.901 unit (2023). Dari perbandingan ini, terlihat bahwa jumlah industri mikro kecil di Jawa pada 2023 lebih dari 100 kali lipat dibandingkan jumlah industri besar sedang. Situasi serupa juga terjadi di Pulau Bali, meskipun dengan pola pertumbuhan yang sedikit berbeda. Industri mikro kecil awalnya mengalami kenaikan dari 148.326 unit pada 2021 menjadi 150.466 unit pada 2022, tetapi kemudian menurun cukup tajam menjadi 125.787 unit pada 2023. Sebaliknya, jumlah industri besar sedang di Bali mengalami fluktuasi dari 431 unit pada 2021 turun menjadi 413 unit pada 2022, lalu kembali naik menjadi 456 unit pada 2023. Meskipun mengalami penurunan, jumlah industri mikro kecil di Bali tetap jauh lebih banyak dibandingkan industri besar sedang, dengan selisih lebih dari 125.000 unit pada 2023.

Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa industri mikro dan kecil (IMK) jauh lebih mendominasi sektor industri dibandingkan industri besar dan sedang (IBS), baik di Pulau Jawa maupun Pulau Bali. Dominasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi industri di kedua wilayah tersebut masih bertumpu pada usaha berskala mikro dan kecil yang lebih inklusif serta mudah diakses oleh masyarakat luas. Sektor ini memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, dan pemerataan ekonomi karena karakteristiknya yang tidak menuntut modal besar dan keterampilan tinggi. Dengan mempertimbangkan dominasi dan kontribusi nyata sektor IMK, peneliti

memilih menggunakan indikator jumlah industri mikro kecil sebagai representasi variabel jumlah industri dalam penelitian ini. Pemilihan indikator ini dinilai lebih relevan dan akurat dalam menggambarkan dinamika industri di kawasan Jawa dan Bali, mengingat skala mikro dan kecil lebih menonjol dari sisi jumlah unit usaha, persebaran wilayah, dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, penggunaan indikator ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap kondisi riil lapangan serta mendukung analisis yang lebih tepat dalam mengkaji pengaruh sektor industri terhadap peningkatan kesempatan kerja di wilayah Jawa dan Bali.



Gambar 1. 5 Jumlah industri mikro dan kecil menurut Provinsi di Pulau Jawa dan Bali tahun 2021-2023 dalam Unit

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Pada gambar 1.5 menunjukkan bahwa data jumlah industri mikro dan kecil di Pulau Jawa dan Bali tahun 2021-2023, terdapat variasi yang signifikan di setiap provinsi. DKI Jakarta memiliki jumlah industri mikro dan kecil sebesar 62,1 ribu pada 2021, sempat turun menjadi 55,1 ribu pada 2022, dan kembali naik ke angka

yang sama di 2023. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi, yaitu 855,4 ribu pada 2021, meningkat menjadi 892,1 ribu di 2022, dan mencapai 977,5 ribu di 2023. Jawa Tengah mencatat 762,1 ribu industri mikro dan kecil pada 2021, turun menjadi 667,8 ribu pada 2022, tetapi kembali meningkat menjadi 862,9 ribu pada 2023. DIY dan Bali memiliki jumlah industri mikro dan kecil yang lebih rendah, tetapi menunjukkan peningkatan signifikan pada 2023. Tren peningkatan ini juga terlihat di Jawa Timur, yang mencatat 874,5 ribu pada 2021, turun menjadi 641,6 ribu di 2022, namun naik tajam menjadi 977,5 ribu pada 2023. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah industri mikro dan kecil di 2023 mencerminkan adanya pemulihan ekonomi di Pulau Jawa dan Bali.

Berdasarkan penjelasan di atas menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja seperti Penanaman Modal Asing dan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Maka dari itu berdasarkan masalah dan fenomena yang diuraikan, peneliti akan melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Investasi Asing, Investasi Domestik, Upah Minimum, dan Jumlah Industri terhadap Kesempatan Kerja di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2010-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi asing, investasi domestik, upah minimum, dan jumlah industri secara parsial terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa dan Bali tahun 2010-2023?

2. Bagaimana pengaruh investasi asing, investasi domestik, upah minimum, dan jumlah industri secara bersama-sama terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa dan Bali tahun 2010-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh investasi asing, investasi domestik, upah minimum, dan jumlah industri secara parsial terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2010-2023.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh investasi asing, investasi domestik, upah minimum, dan jumlah industri secara bersama-sama terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2010-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, dengan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dalam penelitian ini, kebaruan atau pengembangan yang dihadirkan terletak pada penggunaan variabel X_4 , yaitu jumlah industri menggunakan indikator jumlah industri mikro dan kecil. Kemudian, kebaruan lainnya adalah lokasi penelitian yang difokuskan pada wilayah Pulau Jawa dan Bali. Selain itu penelitian ini mencoba memberikan penjelasan perbandingan perbedaan pengaruh antara penanaman modal asing dengan dalam negeri terhadap kesempatan kerja. Dengan adanya

pengembangan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi studi-studi terkait kesempatan kerja di masa mendatang.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Penulis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di wilayah Jawa dan Bali. Selain itu, penelitian ini juga membantu penulis mengasah keterampilan analisis data dan penerapan metode penelitian, yang berguna dalam pengembangan kemampuan akademik di masa depan.

2. Bagi pemerintah

Kegunaan penelitian ini bagi pemerintah adalah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja di wilayah Jawa dan Bali. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pengaruh investasi asing, upah minimum provinsi, dan jumlah industri terhadap penciptaan lapangan kerja, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan kerja di Pulau Jawa dan Bali pada periode-periode selanjutnya.

